

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kota Semarang

Halaman 18

Target Pajak Burung Walet dan Mineral Meleset

BALAIKOTA- Target pendapatan dari sektor pajak burung walet dan mineral bukan logam, gagal memenuhi target. Hal itu diakui Kepala Bidang Pajak II Bapenda Kota Semarang Agus Wuryanto kepada *Wawasan* di Balaikota, Rabu (2/8). Menurutnya, di tahun ini target burung walet sebesar Rp50 juta baru tercapai Rp1 juta, sedangkan target pendapatan pajak galian mineral bukan logam Rp 200 juta belum ada sama sekali.

"Harus diakui, target untuk dua sektor pajak itu selalu mele-

set. Padahal kami berharap target tersebut dapat disesuaikan dengan potensi yang ada," terangnya.

Dijelaskan, dalam beberapa tahun terakhir pendapatan pajak sarang burung walet bahkan tidak masuk sama sekali. Baru tahun ini, ada pemasukan dari sektor tersebut meskipun masih sangat minim.

Diakui, usulan target pendapatan pajak burung walet dan galian mineral bukan logam disesuaikan potensi karena selama ini

targetnya terlalu tinggi. Sementara potensinya sangat rendah karena beberapa faktor.

"Sarang burung walet sekarang nilainya juga sudah turun. Dulu pernah booming air liur burung walet harganya mencapai jutaan rupiah per kilogram. Tapi sekarang sudah turun drastis hanya ratusan ribu rupiah. Produksinya di Semarang juga sangat sedikit karena jumlah pemiliknya juga sedikit," tukasnya.

Ditambahkan, pihaknya sudah melakukan pendataan kepemi-

likan usaha sarang burung walet. Pendataan juga melibatkan kecamatan dan kelurahan serta informasi dari masyarakat.

Sedangkan untuk pajak mineral bukan logam berharap juga disesuaikan karena potensinya di Semarang juga tidak banyak. Di Semarang hanya ada satu perusahaan yang memiliki izin galian yakni PT Indo Perkasa Usahatama (IPU).

"Selain itu galian C juga izinnya berada di pemerintahan provinsi," pungkasnya. ■ *Hid - rth*